

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji tentang politik identitas kelompok Bali yang ada di Kabupaten Banyuasin yaitu di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang yang dimana ada sekelompok pendatang yang memiliki jumlah yang lebih sedikit, dan memiliki budaya dan kepercayaan yang berbeda dengan penduduk pendatang yang lebih awal menempati Desa Muktijaya. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana kelompok Bali agar dapat diterima dan berbaur, bahkan diakui keberadaannya oleh penduduk pendatang yang lebih awal menempati Desa Muktijaya. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui proses dan tindakan apa saja yang dilakukan kelompok Bali agar mendapatkan pengakuan dan mendapatkan haknya agar sama dengan penduduk pendatang lainnya, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan kelompok Bali dengan pendatang lainnya sehingga mereka tidak pernah mengalami konflik dan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai, dan bagaimana peran Negara dalam menghadapi kaum minoritas.

Lazimnya penduduk pendatang tidak mudah mendapatkan pengakuan dan penerimaan, akan tetapi pendatang khususnya etnis Bali dapat diterima dan mempunyai posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelompok Bali menjalin hubungan yang cukup baik dengan pendatang lainnya, mereka tidak pernah mengalami konflik satu sama lain. Desa Muktijaya merupakan daerah transmigran yang dihuni oleh berbagai macam pendatang dari etnis dan agama

yang berbeda seperti etnis Jawa, Bugis, Padang, Bali, Melayu dan penduduk asli Palembang. Penduduk di Desa Muktijaya rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan wirausaha. Penduduk Etnis Bali kebanyak bercocok tanam padi di sawah dan berkebun kelapa dan tanaman sayur lainnya. Di Desa Muktijaya juga terdapat berabagi macam agama seperti Umat Islam, Kristen, Hindu. Dan sesama pendatang mereka dapat saling menerima dan berbaur dengan pendatang yang memiliki jumlah lebih sedikit, bahkan memiliki budaya dan kepercayaan yang berbeda.

Di Desa Muktijaya kelompok Bali menjalin hubungan yang sangat baik dengan pendatang lainnya, kelompok Bali menjunjung tinggi rasa toleransi dan tolong-menolong pada sesama pendatang lainnya. Bahkan kelompok Bali pernah menjadi pemimpin sebagai kepala Desa di Desa Muktijaya, dengan menjabatnya kelompok Bali sebagai Kepala Desa di Muktijaya menjadikan tonggak awal mendapatkan izin pendirian tempat beribadah di Desa Muktijaya. Adat istiadat etnis Bali sampai kini masih tumuh subur di Desa Muktijaya, dan masih diajarkan kepada generasi muda etnis Bali. Contohnya Hari Perayaan Nyepi, Pawai Ogoh-Ogoh, Upacara Ngaben, dan banyak lagi tarian khas Daerah Bali. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana kelompok Bali di Desa Muktijaya agar mendapatkan izin untuk mendirikan tempat beribadah.

Bila dibandingkan kelompok Bali yang ada di Desa Muktijaya dengan kelompok Bali yang ada di Lampung jauh sangatlah berbeda, di mana kelompok bali yang ada di Lampung sering kita dengar mereka mengalami konflik dengan penduduk asli Lampung. Bahkan konflik yang dialami sampai menelan korban.

Salah satu contoh konflik penduduk pribumi dengan penduduk pendatang bisa kita lihat seperti konflik antar suku yang terjadi di Lampung Selatan pada Minggu 28 oktober 2012 yang merengut 3 korban jiwa dan 5 orang terluka, konflik tersebut terjadi karena adanya kesalah pahaman akibat kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Way Arong Desa Siderejo Lampung Selatan. Konflik tersebut diawali seorang suku Bali mengendarai sepeda ontel yang tak sengaja tertabrak oleh gadis yang mengendarai motor yang merupakan penduduk asli suku Lampung.

Dalam peristiwa tersebut suku Bali memberikan pertolongan terhadap gadis yang mengendarai sepeda motor tersebut, namun warga suku Lampung lainnya memprovokasi bahwa warga suku Bali telah memegang dada gadis tersebut. Sehingga pada pukul 22.00 Wib warga suku Lampung berkumpul sebanyak +500 orang di pasar patok untuk melakukan penyerangan kepemukiman warga suku Bali di des Bali Nuraga Kec. Way Pani, akibat penyerangan tersebut satu kios obat-obatan pertanian dan kelontong terbakar milik Sdr Made Sunarya (40 Tahun, Swasta)¹. Contoh konflik lainnya seperti konflik antara suku Dayak dan Suku Madura di Kalimantan Barat, yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural yang dilandasi oleh faktor-faktor kultural². Untuk itu penelitian ini menguraikan atau menjelaskan bagaimana Etnis Bali menyesuaikan diri dan melebur dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

¹ Wahyu Anhar. "Lintas Berita", 30 Oktober 2012, artikel diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 19:30 dari www.lintasberita.web.id/perang-suku-lampung-sebuah-dendam-lama/.

² Sari Nurulita, "Konflik Antar Suku Dayak Dan Madura" 11 Januari 2012, artikel diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 19:35 dari <http://nurulita-1521141.blogspot.com/2012/01/konflik-antara-suku-dayak-dan-madura.html?m=1>

Salah satu politik kultural adalah politik identitas yaitu pengakuan akan kesetaraan nilai-nilai kultur yang berbeda-beda sebagai dasar universal yang dibutuhkan bagi suatu penerimaan tak bersyarat. Politik identitas memperlihatkan sebuah ekspresi mengenai begitu kompleksnya kebutuhan manusia akan perasaan penerimaan dan memiliki (*sense of belonging*). Politik identitas dapat dikatakan sebagai tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas, atau karakteristik, baik berbasis pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan³. Maka Wuerde atas dasar hak-hak kebebasan individual. Bahwa jati diri manusia tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif, namun identitas kolektif tak pernah boleh melegitimasi penindasan atas individu-individu subyek multicultural hanya mungkin berkembang menuju pemenuhan jati dirinya jika ditopang dengan pilar-pilar intersubjektif seperti pengakuan, respek dan penghormatan dari orang lain.

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak hanya hidup di ruang hampa dari berbagai interaksi sosial, menuntut adanya interaksi yang intensif dengan manusia yang lainnya. Adanya interaksi tersebut tentunya, disadari atau tidak disadari, akan menghadirkan benturan-benturan kepentingan ataupun sekedar penguatan identitas suatu komunitas atas komunitas lainnya. Implikasinya, kelompok yang berhasil dalam proses penguatan identitas tersebut karena adanya dukungan sosial, baik dengan pertimbangan kuantitas ataupun kualitas, cenderung akan memproklamirkan diri sebagai kelompok mayoritas yang

³ Mardety Mardinsyah, "Mardetymardinsyah Center", 6 Desember 2013, artikel diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 19:50 dari www.mardetymardinsyah.com/2013/12/06/politik-pengakuan-dalam-multikulturalisme-menurut-charles-taylor/

disadari atau tidak disadari akan memunculkan pula kelompok minoritas sebagai kelompok yang umumnya dianggap sebagai komunitas sosial kelas dua yang berada di bawah pengaruh kelompok mayoritas dalam berbagai dimensi kehidupan sosial meski biasanya mengabaikan aspek-aspek produktivitas kelompok minoritas.

Parahnya, pengaruh kelompok mayoritas terhadap minoritas biasanya sudah menyentuh hal-hal yang sangat prinsip kelompok yang sudah menjadi hak asasi bagi komunitas yang dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Dalam hal keyakinan beragama misalnya, apa yang diyakini sebagai kebenaran oleh kelompok mayoritas sebagai suatu keyakinan beragama yang normative dan profan, harus dihormati oleh kelompok minoritas sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Sebaliknya, apabila kelompok minoritas memiliki keyakinan beragama yang berbeda dengan kelompok mayoritas, maka mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang telah melawan keyakinan arus utama sehingga berbagai tindakan provokatif dan refresif sering mereka peroleh dari kelompok mayoritas seperti pelabelan sebagai kelompok sesat, diskriminasi dalam hal akses pada pelayanan public, pemasangan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan, bahkan sampa pada tindakan-tindakan brutal seperti membakar rumah ibadah, penyerangan dan pembantaian terhadap komunitas tertentu yang semua itu merupakan suatu tindakan yang tidak pernah dibenarkan oleh agama dan keyakinan apapun.

Pada sisi lain, kelompok minoritas yang umumnya mendapatkan tindakan-tindakan provokatif dan refresif dari kelompok mayoritas biasanya pada mulanya

mau membuka diri berdialog dan bekerjasama akan tetapi manakala tindakan-tindakan provokatif dan refresif tidak juga terhenti, mereka mulai membangun stereotif bahwa kelompok mayoritas adalah kelompok masyarakat yang sudah tidak mengenal lagi etika sosial bermasyarakat karena sudah lebih memilih penyelesaian persoalan dengan menggunakan prinsip hukum rimba ”*siapa kuat dia berkuasa, siapa lemah dia tertindas*”, kemudian mereka lebih menarik diri dari pergaulan sosial dengan segala kebencian yang belum bisa terbalaskan.⁴

Adanya kesenjangan jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas ini tentu akan menjadi suatu sandungan tersendiri demi terciptanya kestabilan pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan berkeyakinan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meretas mayoritas dan minoritas sebagai modal hidup bersama perlu digalangkannya melalui berbagai perspektif yang salah satunya adalah politik identitas.

Di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan masalah etnis, ras, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas itu. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik.

⁴ Latif Syarifuddin, “Meretas Hubungan Mayoritas –Minoritas Dalam Perspektif Nilai Bugis” Jurnal Al-Ulum Volume. 12, Nomor 1, Juli 2012. Hal. 98-99.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya pembatasan dan perumusan masalah. Pada bagian ini merupakan bagian yang memberikan penjelasan tentang pembatasan dan perumusan masalah.

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadinya pelebaran fokus dari pembahasan dan analisis materi dan data. Oleh sebab itu peneliti membatasi masalah hanya pada politik identitas kelompok Bali di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana diskursus identitas dalam masyarakat di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana pola perilaku dan tindakan apa saja yang dilakukan Etnis Bali dalam memperoleh pengakuan dari penduduk lain yang berasal dari latar etnis yang berada di Desa Mukti Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, dalam penelitian politik identitas kelompok Bali di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana diskursus identitas dalam masyarakat Di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola perilaku dan tindakan apa saja yang dilakukan Etnis Bali dalam memperoleh pengakuan dari penduduk lain yang berasal dari latar etnis yang berada di Desa Mukti Jaya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, wawasan hazanah pengetahuan, dan bermanfaat bagi prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang politik identitas kelompok Bali di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi fasilitas akademika (mahasiswa dan dosen) dan bagi peneliti berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk melihat dan memetakan letak perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu, ketika peneliti dapat memetakan

penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini akan diketahui dimanakah letak posisi peneliti saat ini.

Penelitian yang pertama yang relevan dengan penelitian yang ditulis oleh Yosafat Hermawan Trinugraha (2013) dengan judul *Politik Identitas Anak Muda Minorita: ekspresi identitas anak muda Tionghoa melalui dua organisasi anak muda Tionghoa di Surakarta Pasca Orde Baru*. Tulisan ini mengkaji tentang politik identitas yang dilakukan oleh SYC dan HYC di Surakarta Pasca Peristiwa Mei 1998, antara lain terepresentasikan lewat kegiatan-kegiatan sosial secara umum berusaha mencairkan dan mendekatkan jarak sosial dengan kelompok masyarakat non Tionghoa. Gerakan pemuda ini memungkinkan terjadinya relasi kuasa antara generasi tua dengan generasi muda dikalangan etnis Tionghoa dalam dua organisasi Tionghoa. Strategi yang dilakukan dalam rangka membuat wacana besar dan stereoptype yang selama ini diberikan kepada masyarakat Tionghoa di Indonesia dan telah berakar sejak jaman kolonial sebagai komunis yang dinggap eksklusif, berjarak, bukan warga asli dan tidak bisa membaur. Kegiatan sosial yang dilakukan organisasi pemuda Tionghoa ini seperti bakti sosial, jobfair, maupun taman belajar⁵.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian ditulis oleh Gm. Sukamto, Dr. yang berjudul *Politik Identitas: Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Interaksi "Lokalitas" dan "Gloabalisasi"*. Tulisan ini karya yang dihajadkan untuk mengkonstruksi secara dialektis antar "Identitas Kota Malang" dengan Masyarakat Warga (Civil Society), yang plural dan multikultural. Identitas dapat

⁵ Hermawan Yosafat, "Politik Identitas Anak Muda Minoritas" Jurnal Studi Pemuda, Vol 2. No. 2, September 2015, h. 173-185.

ditemukan di dalam seksualitas di mana penandaan di antara kebudayaan terselip kuasa, kuasa maskulin atas feminim sebagai misal yang belakangan juga marak di dalam masyarakat warga. Identitas juga menjadi bagian sentral dalam aktivitas keagamaan, apapun istilah agamanya, sistem penandaan ini pula yang menjadi bagian yang sentral bahkan krusial dalam politik identitas keagamaan, hal ini terjadi baik di dalam internal agama, maupun antar agama yang satu dengan yang lainnya.

Politik identitas dalam etnisitas juga menonjol sebagai contoh etnis Melayu, etnis Cina, etnis Jawa, Madura dan sebagainya. Interrelasi dan bisa jadi saling pengaruh antara identitas dan perubahan sosial sebagai pertarungan baik secara warga, badan politik, dan pasar. Penerapan dan atau pengaktualisasian pada seorang dapat saja mencerminkan dan atau mewakili dirinya sendiri maupun institusi dalam konteks seksualitas terjadi antara feminim dan maskulin, dalam konteks etnisitas dapat Jawa, Madura, Bali, Tinghoa, Arab, dan sebagainya; dalam konteks agama terjadi dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Tridharma atau Khong Hu Chu. Identitas dalam diri seorang dapat saja sekaligus mewakili institusi baik itu seksualitas, etnisitas, agama, dan nasionalitas⁶.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Bethra Ariesta yang berjudul *Akar Konflik Kerusuhan Antar Etnik Di Lampung Selatan*. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menggali informasi mengenai akar terjadinya konflik. Konflik antara Desa Balinugara dan Desa Agom bisa dianggap

⁶ Gm Sukamto, "Politik Identitas Suatu Kajian Awal Dalam Kerangka Dan Interaksi "Lokalitas" dan "Globalisasi", Jurnal Sejarah Budaya, Volume 3, Nomor 2, Desember 2010, h. 12-14.

sebagai akumulasi dari konflik-konflik sebelumnya. Riwayat konflik di Lampung Selatan menurut berbagai penelitian yang telah tercatat sudah ada sejak tiga puluh tahun silam. Pada tahun 1982, akibat perselisihan warga Desa Sandaran dan Desa Balinugra, warga Balinugra membakar dua rumah warga Desa Sandaran. Tahun 2005 masyarakat Balinugra di Kecamatan Ketapang membakar beberapa rumah penduduk di Desa Palas Pasemah. Kemudian pada tanggal 29 November 2011 masyarakat Balinugra melakukan penyerangan ke Desa Marga Catur. Lalu pada tanggal 24 Januari 2012, masyarakat Desa Napal yang beretnik Bali bersengketa dengan warga Desa Kota Dalam yang beretnik Lampung. Peristiwa itu dipicu oleh keributan antar pemuda desa soal lahan parkir dan kebut-kebutan sepeda motor. Mereka yang tidak terima lalu merusak dan membakar sejumlah rumah warga Kota Dalam. Aksi itu juga melukai sejumlah warga, aksi kekerasan itu dibalas dengan turunnya ribuan orang dari Kota Dalam dan sekitarnya yang membakar serta merusak sekitar 89 rumah penduduk Desa Napal.

Konflik yang terjadi antar etnik Bali (Balinugara) dan etnik Lampung (Agom) pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2012 disebabkan oleh satu akar penyebab utama yaitu perilaku etnik Bali (Balinugara) dalam hidup bermasyarakat yang dianggap menyinggung perasaan dan tidak sesuai dengan adat istiadat etnik pribumi (Etnik Lampung). Selain dua faktor itu yang memperkuat terjadinya konflik, yaitu dendam dari konflik-konflik sebelumnya yang melibatkan etnik bali (Balinugara) dengan desa-desa mayoritas etnik Lampung di sekitar desa Balinugara, perasaan sakit hati dari etnik Lampung, karena banyak tanah penduduk yang beralih tangan kepada warga Desa

Balinugara melalui jerat htang, penyelesaian konflik-konflik terdahulu yang tidak pernah tuntas menyentuh sampai akar permasalahan konflik, dan pelanggaran atas perdamaian yang telah disepakati serta belum ada penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar dan mengakibatkan konflik terulang kembali⁷.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Yusuf Hidayat yang berjudul *Hubungan Sosial Antara Etnis Banjar dan Etnis Madura Di Kota Banjarmasin* penelitian ini adalah untuk memahami integrasi sosial antara etnis Banjar dan Madura di Kota Banjarmasin. Berbeda dengan kota lain di Kalimantan, di Kota Banjarmasin, etnis Banjar dan Madura dapat hidup bersamaan tanpa ada konflik keras meskipun kedua etnis tersebut sama-sama dikenal sebagai etnis pedagang. Penelitian ini mengkaji bagaimana hubungan sosial etnis Banjar dan Madura sehingga tercipta integrasi sosial di antara mereka.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor yang mendukung terciptanya hubungan harmonis antara masyarakat etnis Banjar dan etnis Madura. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, mereka terintegrasikan oleh kesamaan agama (Islam). Melalui acara-acara ritual keagamaan, mereka berbaur dan saling bersilaturahmi sehingga bisa dijadikan sebagai media untuk saling memahami antara dua kebudayaan yang berbeda. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan perkumpulan warga (khususnya ibu-ibu) yang rutin dilakukan tiap minggu baik berupa acara yasinan maupun arisan yang dilakukan secara bersama-sama antara etnis Banjar dan etnis Madura menjadi alat untuk mencairkan hubungan antara

⁷ Ariestha Bethra, "Akar Konflik Kerusakan Etnik Di Lampung", *Journal Of Social And Industrial Psychology*, Volume 1, Nomor 2, November 2012, h. 11.

kedua kelompok ini. Ketiga, posisi sejajar antara etnis Banjar dan etnis Madura dalam proses perdagangan mengingat keduanya sama-sama mempunyai tradisi perdagangan menciptakan posisi yang berimbang antara keduanya. Keempat, masalah pertahanan di Gang Stall tidak pernah muncul karena administrasinya cukup rapi. Rapinya masalah pertahanan ini telah meredam kemungkinan konflik karena faktor pertanahan yang banyak terjadi di berbagai tempat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bebrapa fakta yaitu, agama dan aktivitas ritual merupakan media integrase bagi etnis Banjar dan etnis Madura, penegakan hukum dalam masyarakat telah menimbulkan rasa hormat masyarakat terhadap hak orang lain, dan sikap etnis Madura yang menghormati budaya local menumbuhkan pemahaman yang baik pada masyarakat etnis Madura terhadap etnis Banjar⁸.

Di dalam buku *Rezim Lokal Di Indonesia* (Bayo et all, 2018), rezim lokal di Gorontalo digerakkan oleh jaringan marga, yang terjadi di bebagai ranah kehidupan masyarakat maupun pemerintah. Implikasinya, kita sulit menemukan wajah *demos* di Gorontalo. Akses rakyat terhadap pelayanan ataupun urusan publik lebih banyak menggunakan jejaring kekeberabatan marga dibandingkan menyadari bahwa mendapatkan pelayanan publik dari Negara adalah hak warga negara. Begitu pula sebaliknya. Distribusi sumber daya negara kepada warga juga lebih banyak memanfaatkan jejaring kekerabatan marga. Dengan kata lain, marga berfungsi sebagai solidaritas instrumental bagi anggotanyasehingga kepentingan marga lebih diutamakan, seperti misalnya dalam pembagian jabatan-jabatan

⁸ Hidayat Yusuf, "Hubungan Sosial Antara Rtnis Banjar Dan Etnis Madura Di Kota Banjarmasin", Jurnal Komunitas, Volume 5, Maret 2013, h. 88-91.

publik dipemerintahkan yang lebih memprioritaskan anggota marganya, tanpa mempertimbangkan kapasitas.

Kedekatan hubungan darah sebagai faktor determinan dibandingkan faktor kapasitas sedemikian rupa menjadi solidaritas instrumental, sehingga memprioritaskan anggota keluarganya sendiri dianggap wajar karena ekspektasi sosial yang diletakkan pada keluarga, yakni keluarga dapat membantu anggotanya untuk memberikan jaminan kesejahteraan. Inilah yang dimaksud dengan solidaritas instrumental keluarga. Implikasi dari bekerjanya jejaring marga di ranah formal ini sering terjadi konflik kepentingan antara mengutamakan kepentingan keluarga/marga dengan kepentingan publik dalam mengelolah urusan publik⁹.

F. Kerangka Teori

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam penyesuaian antara konsep di lapangan dengan Teori yang ada, dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka perlu adanya kerangka piker sebagai acuan dan pedoman penyusunan, kerangka piker yang dimuat di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti, dan penulis mencoba menggunakan kerangka teori ini sebagai landasan penelitian, penulis ambil dari beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

⁹ Bayo LN, dkk. *Rezim Lokal Di Indonesia (Memaknai Ulang Demokrasi)* (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2018) hal. 231-232.

1. Politik Identitas

Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus diletakkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh Suparlan, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan diletakkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandai masuknya dalam satu kelompok atau golongan tertentu¹⁰. Sementara Buchari mengutip Jumadi (2009) mengembangkan bahwa konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut¹¹. Secara tegas, Cressida Heyes dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu¹². Ketimbangan perorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan atas pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup institusi (keanggotaan) dari

¹⁰ Suryani, "Politik Identitas Dan Nasionalisme (Studi Atas Penguatan Politi Identitas Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru" Skripsi, (Jakarta: Lp2m UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 27.

¹¹ *Ibid*, hal. 27.

¹² *Ibid*, hal. 27.

kelompok dalam konteks yang lebih luas. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensial tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Politik identitas di kalangan orang Bali bisa sangat mudah tampak pada stereotip yang ditunjukkan dan menjadi asumsi umum misalnya kebiasaan orang Bali yang hidup berkelompok di wilayah tertentu, perayaan tradisi yang dilakukan secara bersamaan seperti Hari Raya Nyepi, Galungan namun demikian, Catells juga menegaskan bahwa "*Identities can also be originated from dominant institutions, they become identities only when and if social actors internalize them and construct their meaning around this internalization*"¹³ Catells mengemukakan bahwa identitas tidak hanya tentang bagaimana individu mengidentifikasi dirinya sendiri, tapi juga bagaimana kelompok dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompok tertentu yang diletakkan pada ciri-ciri dan stereotip yang diletakkan pada mereka. Dalam menentukan politik identitas, menurut Catells harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentuk identitas, yaitu:

- a. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan meletakkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.

¹³ *Ibid*, hal. 28.

- b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang diletakkan oleh aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan bentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, konstruksi identitas inilah yang oleh Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.
- c. *Project identity* atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan¹⁴.

Merujuk pada beberapa pemahaman diatas, politik identitas berakar pada stereotip yang dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti konsep *polity* Aristoteles, Primordialisme berarti “berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Dalam wacana pluralism, ketika demokratisasi digulirkan dengan mendapatkan dukungan kuat dari konsep multikulturalisme, politik identitas seolah menemukan kekuatannya, dimana keberadaan minoritas berubah dari didiamkan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan baik dengan melakukan asimilasi maupun akulturasi yang bersifat sistemik. Perjuangan politik identitas akan menemukan muaranya saat stereotip yang diletakkan dapat disejajarkan dengan eksistensi

¹⁴ *Ibid*, hal. 29.

kelompok dengan identitas lain dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam lingkup sosial, budaya dan politik, hal tersebut bisa dilakukan dalam kultur demokrasi.

Dari beberapa pemahaman diatas, politik identitas dapat dipahami sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok kerana memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan¹⁵.

2. Politik Pengakuan

Di dalam filsafat politik kontemporer, politik selalu didefinisikan setidaknya dengan dua kategori, yakni kategori redistribusi (*redistribution*), dan kategori pengakuan (*recognition*). Kategori redistribusi menurut Fraser, berarti setiap orang menginginkan distribusi kekayaan alam, dalam bentuk modal maupun sumber daya, secara adil dan merata. Sementara kategori pengakuan berarti, bahwa setiap orang ingin menciptakan masyarakat yang 'ramah terhadap perbedaan' (*difference friendly culture*). Artinya dengan kultur mayoritas untuk bisa mendapatkan pengakuan yang sepatutnya. Pihak-pihak yang menyetujui kategori redistribusi menginginkan pembagian kekayaan yang adil merata bagi seluruh pihak. Sementara pihak-pihak yang lebih menyetujui kategori pengakuan hendak memperjuangkan pengakuan bagi partikularitas etnis, ras, orientasi

¹⁵ *Ibid*, hal. 29.

seksual, dan gender mereka. Dua kutub ini telah menjadi pusat perdebatan di dalam filsafat politik kontemporer¹⁶.

Menurut Fraser perdebatan di antara dua kutub tersebut semakin menungkat intensitasnya. Dalam banyak kasus perjuangan untuk memperoleh pengakuan dari kultur minoritas seringkali terpisah sama sekali dari perjuangan untuk mewujudkan pembagian kekayaan yang merata. Fraser memberikan contoh tentang perjuangan feminis. Bagi kaum feminis pembagian kekayaan yang adil dan merata justru semakin memperkuat dominasi kaum laki-laki di dalam ruang public, yakni ketika bantuan dipandang sebagai sumbangan ataupun bantuan semata. Yang dibutuhkan kaum feminis adalah pengakuan akan perbedaan, dan bukan bantuan. Dalam konteks akademis para pemikir feminis, yang melihat gender sebagai suatu konstruk sosial, juga seringkali berdebat keras dengan para pemikir lainnyayang melihat gender sebagai suatu bentuk identitas ontologis yang bersifat statis. Perdebatan ini sebenarnya dapat dilihat sebagai gejala munculnya suatu gejala buruk, yakni terpisahnya politik kultural (*cultural politics*) dan politik praktis (*sosial politics*), dan terpisahnya politik perbedaan (*politics of difference*) dari politik kesetaraan (*politics of equality*)¹⁷.

Dalam merumuskan konsep Fraser hendak melepaskan dirinya dari pemahaman tradisional tentang identitas di dalam model politik pengakuan. Di titik ini politik pengakuan dipahami sebagai pengakuan terhadap identitas khusus kelompok partikular (*group specific cultural identity*). Politik pengakuan mengalami hambatan besar, ketika identitas kelompok particular tersebut tidak lagi

¹⁶ Wattimewa Reza A. A, *Multikulturalisme Untuk Indonesia*, (Kanisus, Jogjakarta 2010), hal. 43.

¹⁷ *Ibid*, hal. 45.

diakui oleh kelompok yang dominan di dalam masyarakat. Akibatnya orang-orang yang berbeda di dalam kelompok partikular tersebut bisa mengalami krisis identitas. Disinilah perjuangan politik pengakuan, yakni perjuangan untuk menegaskan identitas kultural khusus orang-orang yang berbeda dari kultur mayoritas. Dengan demikian menurut Fraser dalam konteks penentuan identitas, politik pengakuan adalah politik identitas (*identity politics*). Akan tetapi ada masalah teoritis yang cukup pelik disini. Jika kita memahami identitas yang tidak diakui sebagai krisis identitas, maka bagi Fraser kita terlalu memberikan prioritas terhadap struktur psikis dari manusia dari pada konstruk sosial yang mendeterminasinya. Akibatnya kesadaran individu yang dipaksa dan dituntut untuk menyesuaikan dengan kultur kelompok. Kompleksitas identitas partikular yang merupakan fakta keras di dalam masyarakat majemuk, seperti seseorang bisa sekaligus orang Jawa, orang Islam, dan sekaligus bersekolah di sekolah Katolik pun hilang karena dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan salah satu kelompok di mana orang menyangkal, adanya identitas trans-kelompok, dan hanya mengakui identitas kelompok partikularnya semata. Secara umum menurutnya model berfikir semacam ini terlalu mudah jatuh ke dalam komunitarianisme represif.

Dalam konteks ini Fraser lalu menawarkan sebuah pemahaman baru tentang pengakuan (*recognition*). Ia pun mengartikan pengakuan sebagai persoalan yang bukanlah identitas kelompok khusus tetapi status anggota kelompok sebagai individu penuh di dalam interaksi sosial. Tidak adanya pengakuan dalam arti ini bukanlah hilangnya identitas kelompok, melainkan

sebagai diskriminasi sosial yang membuat orang tidak dapat berpartisipasi di dalam kehidupan secara sosial secara maksimal. Politik pengakuan pun tidak bisa lagi dipahami sebagai politik identitas. Dengan model yang disebut Fraser sebagai model status (*status model*) ini politik pengakuan dapat diartikan sebagai suatu politik yang hendak melampaui semua bentuk diskriminasi dan subordinasi dengan mengakui semua orang, lepas dari apapun kelompoknya, sebagai bagian integral di dalam masyarakat, yang mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial. Jika hal ini dapat diwujudkan, masyarakat dapat mencapai tahap pengakuan timbal balik dan kesetaraan status sosial secara memadai. Dan sebaliknya jika beberapa kelompok masyarakat mengalami diskriminasi dan subordinasi oleh kelompok-kelompok lainnya, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial, maka keadaan ini, oleh Fraser, dapat disebut sebagai keadaan ‘tidak adanya pengakuan’ (*misrecognition*) dan subordinasi status (*status subordination*)¹⁸.

Banyak contoh yang mengajukan terjadinya subordinasi status semacam ini, mulai dari pernikahan dari pernikahan di antara jenis kelamin sejenis yang dianggap tidak sah, dan stigma yang diberikan kepada mantan narapidana sebagai orang yang tidak mampu berpartisipasi secara maksimal di dalam kehidupan sosial. Dalam kasus-kasus ini interaksi sosial diwarnai dengan tegangan antara apa yang normatif, yakni yang baik, dan apa yang merupakan preventif, atau yang tidak baik. Seluruh konsep politik pengakuan sebagai pengakuan status sosial yang dirumuskan Fraser ini sebenarnya dapat disimpulkan kedalam satu argument,

¹⁸ *Ibid*, hal 110.

yakni bahwa semua pihak haruslah dibebaskan dari subordinasi status sosial, sehingga dapat diakui statusnya secara penuh sebagai anggota masyarakat yang dapat diakui statusnya secara penuh sebagai anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi maupun berinteraksi juga secara penuh.

Model status ini diharapkan mampu menambal kelemahan-kelemahan yang ada di dalam politik identitas. Pertama, dengan menolak pendefinisian politik pengakuan melalui sebagai politik yang memprioritaskan kelompok secara mutlak, maka model status yang ditawarkan Fraser tidak lagi terjebak pada proses pemutlakan identitas kelompok. Kedua, dengan memandang kesetaraan status sebagai kesetaraan kesempatan dalam partisipasi sosial, politik model status yang ditawarkan Fraser memberikan kesempatan bagi interaksi antara kelompok kultural yang berbeda secara lebih besar. Dari sudut pandangan ini politik pengakuan model status dapat mencegah terjadi eksklusivisme kultural, ataupun separatism. Fraser lebih menjelaskan, bahwa politik pengakuan dengan model status sosial yang dirumuskannya memiliki dampak positif yang lebih besar lagi. Tidak seperti politik identitas, politik model status ini tetap berbed di level moralitas Kantian, dan tidak terjatuh kedalam etika *sittlichkeit* ala Hegel. Dengan memahami politik pengakuan sebagai politik kesetaraan status sosial, politik model status ini menyediakan kerangka kewajiban moral di dalam ranah politik pengakuan, yakni dengan melepaskan politik politik pengakuan dari ketergantungan terhadap nilai-nilai kultural partikular tertentu. Dengan demikian

tulisan Frase model status memperbolehkan orang untuk menggabungkan pengakuan dan redistribusi tanpa perlu terjatuh ke dalam schizoprenia filosofis¹⁹.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian. Metode penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Menurut Suharismi Arikunto, jenis penelitian yang terkait dalam aspek-aspek, yaitu ditinjau dari tujuannya, bidang ilmu, pendekatan, tempat penelitian, dan variabel penelitian.²⁰

a. Penelitian ditinjau dari tujuan

¹⁹ *Ibid*, hal. 114.

²⁰ Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

Penelitian ini menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu penelitian yang dapat ditinjau dari tujuannya. **Pertama**, Penelitian deskriptif, merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai gejala atau fenomena. Penelitian ini juga bertujuan menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Kedua, Penelitian eksploratif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu dan teknik ini juga sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif. **Ketiga**, Penelitian developmental, penelitian ini digunakan untuk menemukan suatu model atau *prototype*. Maksudnya dalam penelitian ini, pengujian data dibandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada waktu menyusun desain penelitian.²¹

Selanjutnya yang **keempat**, Penelitian verifikatif yakni penelitian ini untuk menguji dan mengecek kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.²² Ditinjau dari tujuan, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menyelidiki

²¹ <https://anfieldvillage.wordpress.com/2013/10/02/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan-tujuan-metode-pendekatan-dan-bidang-ilmu/> Diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 23.34 WIB.

²² Suharismi Arikunto. *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 8.

keadaan atau kondisi, kegiatan, peristiwa karena menurut peneliti jenis penelitian ini sangat relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

b. *Penelitian ditinjau dari pendekatan*

Langkah memilih pendekatan ini tidak dapat diabaikan peranannya dalam menentukan penelitian kualitatif. **Pertama**, penelitian pendekatan historis adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang ditulis kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengungkap pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek tersebut memposisikan dirinya sendiri.²³

Kedua, penelitian pendekatan fenomenologi, menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini, dilakukan dalam situasi yang dialami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Menurut Creswell pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan dasar tertentu.

Ketiga, Penelitian pendekatan grounded theory, tujuan pendekatan ini adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan situasi tertentu. Situasi dimana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu

²³ *Ibid.*, hal. 12.

peristiwa. Inti dari pendekatan ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat pada konteks peristiwa yang dipelajari.²⁴

c. *Penelitian ditinjau dari bidang ilmu*

Semua bidang ilmu memerlukan pengembangan lewat aktivitas riset, riset ini berjudul *Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin* Jika ditinjau dari bidang ilmu, maka penelitian ini termasuk kedalam bidang kajian sosial politik Islam. Karena dalam penelitian ini mengkaji politik identitas yang dilakukan Etnias Bali untuk dapat diterima dan diakui keberadaannya.

d. *Penelitian ditinjau dari tempatnya*

Jika dilihat dari tempat atau latar dimana seorang peneliti melakukan penelitian, maka jenis penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: a) penelitian laboratorium, b) penelitian lapangan, c) penelitian perpustakaan. Penelitian laboratorium biasanya dilakukan dalam bidang ilmu eksakta, misalnya penelitian kedokteran, elektro, sipil dll. Penelitian lapangan biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi dimana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian perpustakaan dilakukan di perpustakaan dengan melakukan

²⁴*Ibid.*, hal. 14

kajian terhadap literature, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang ada dipergustakaan.

Semakin canggihnya teknologi informasi, maka penelitian jenis ini saat ini tidak harus dilakukan di perpustakaan secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan dari lokasi mana saja dengan memanfaatkan Internet sebagai media untuk mencari informasi di perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia yang membuat data mereka dapat diakses secara langsung oleh pengguna secara gratis dan kapan saja.²⁵ Maka dari itu jika dilihat dari tempat penelitian, penelitian ini menggunakan lapangan atau *field research* yang di anggap relevan dengan kajian. Lokasi Penelitian dari penelitian ini adalah di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

e. *Penelitian ditinjau dari hadirnya variable*

Variable adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang ditangkap (*dijinggleng-Jawa*) dalam suatu kegiatan penelitian (*Point to br noticed*), yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari istilahnya variable itulah terkandung makna variasi. Variable juga disebut dengan istilah “urban”, karena dapat berubah-ubah, bervariasi.

Berdasarkan waktu terjadinya variable dibedakan menjadi tiga masa yaitu *pertama* masa lalu, adalah penelitian tentang variable yang

²⁵ https://afidburhanuddin.files.wordpress.com/2012/05/ragam-dan-jenis-penelitian_leni-wahyuni_oke.pdf. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 10.10 WIB.

kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. **Kedua** masa saat ini, adalah penelitian yang dikenal dua decade terakhir, yaitu penelitian tindakan. Dalam penelitian model ini peneliti sengaja memunculkan variable yang dikenakan kepada subjek tindakan. Ketika proses kejadian tindakan berlangsung, oleh peneliti proses situ diamati secara seksama, karena memang yang diutamakan adalah bagaimana proses tindakan tersebut berlangsung dan bagaimana dampaknya.

Ketiga masa yang akan datang, selain penelitian variable “masa lalu” yang variabelnya sudah hadir sebelum penelitian dilaksanakan dan penelitian yang variabelnya ada langsung diteliti proses kehadiran dan berlangsungnya kejadian, ada juga penelitian yang menghadirkan variable, yaitu dengan sengaja membuat agar ada variable yang hadir, kemudian diteliti dan dicermati bagaimana dampaknya. Inilah yang dikenal dengan penelitian eksperimen atau penelitian percobaan. Dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat atau dampak sesuatu kejadian atau variable yang dihadirkan oleh peneliti.²⁶ Ditinjau dari variabelnya penelitian ini terjadi pada masa lalu-masa sekarang, karena penelitian ini sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Begitu juga variabel masa sekarang penelitian tetap *Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

²⁶ Suharismi Arikunto. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, hal. 17-19.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data *kualitatif*, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan serta hasil dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Maka data utama diperoleh dari responden yaitu kepala Desa Muktijaya, Tokoh Adat Bali, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Muktijaya. Sumber data yang dipakai penulis yaitu mengenai populasi dan sample, yang populasinya diambil dari kepala Desa Muktijaya, Tokoh Adat Bali, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder yaitu:

2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap jauh lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder²⁷. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari kepala Desa Muktijaya, Tokoh Adat Bali, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Muktijaya.

²⁷ Soeranto dan Lincoi Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn, Jogjakarta 2018), h. 70.

Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci.

2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya²⁸. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan tertulis arsip dokumen, buku, surat kabar, agenda, skripsi, jurnal yang terkait serta data linnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah pengumpulan data²⁹. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis, observasi tidak terbatas

²⁸ Ibid, hal. 71.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta. 2016), hal. 137.

pada orang, tetapi juga obyek-obyek yang lain³⁰. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Sejarah Desa Muktijaya dan awal mula kedatangan transmigran khususnya etnis Bali.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden³¹. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri Kepala Desa Muktijaya, Tokoh Adat Bali, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Muktijaya serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan. Peneliti akan wawancara Kepala Desa Muktijaya, Tokoh Adat Bali, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat Desa Muktijaya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan

³⁰ *Ibid*, hal. 145.

³¹ *Ibid*, hal. 138.

dengan masalah penelitian³². Dokumentasi disini bermaksud untuk menghimpun data-data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu juga metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah yang terjadi di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sebagai pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena penelitian ini ingin fokus pada Politik Identitas Kelompok Bali di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisa data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesisa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data

³² Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Renika Cipta, Jakarta 2009), hal.83.

Kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis³³.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lapangan model Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus cara tuntas. Langkah-langkah model Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada data penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). Reduksi data / proses transformasi

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta. 2016), hal. 244.

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami³⁴.

3. Manipulasi Data

Manipulasi data adalah bentuk analisis yang mengubah atau menyederhanakan data setelah digolongkan dan dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok yang kemudian dilakukan manipulasi data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antarfenomena, sehingga data-data mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasi.

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

³⁴ Ibid, hal, 245-247.

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat penelitian kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap³⁵. Sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kasual atau interkatif, hipotesis, atau teori³⁶.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang berjudul: Politik Identitas Kelompok Bali di Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Berisikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

³⁵ Ibid, hal. 252.

³⁶ Ibid, hal. 246.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Berisikan tentang Desa Muktijaya Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin, sejarah Desa Muktijaya, Riwayat hidup Kepala Desa Muktijaya, Tokoh Adat Bali, Tokoh Masyarakat, dan sumber yang mengetahui kunci penelitian ini. Landasan teori untuk menjawab permasalahan yang ada, mengenai sejarah kedatangan etnis Bali di Desa Muktijaya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisikan deskripsi hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang telah ditetapkan, analisa data dan hasil temuan dalam bab ini dikemukakan berkaitan dengan persoalan pokok yang dikaji tentang Politik Identitas kelompok Bali di Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.